

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
26/PUU-XI/2013 TERKAIT HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Sondang Meilanny Franciska, NIM 1614101058

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum atas berlakunya hak imunitas dari advokat dan penegakan atas tindak *obstruction of justice* yang dilakukan advokat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat namun tidak mengatur dengan jelas. Ketidakjelasan terdapat pada kata itikad baik setelah dilakukan interpretasi kalimat itikad baik dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penegakan hukum terhadap delik tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat dalam perkara korupsi di Indonesia yakni terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan oleh pihak kepolisian kepada pihak organisasi advokat yang menaunginya lalu ditindak sesuai hukum yang berlaku

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Advokat, dan Hak Imunitas

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO.26/PUU-XI/2013 CONCERNING THE RIGHTS OF THE ADVOCATE'S
IMMUNITY IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION***

By : Sondang Meilanny Franciska, NIM 1614101058

Law Courses

ABSTRACT

This study objective is to revaluation and analyze the legal arrangements for the law of the immunity rights of advocates and fulfilling of obstruction of justice acts performed by advocates. This research is a study that uses normative legal research methods using a type of statue approach, conceptual approach and historical approach. The legal material used in this paper is primary, secondary, and tertiary that are useful for obtaining conclusions that relevant to the problem in this study The results show that (1) The legal arrangement of the rights of an Advocate in corruption criminal act is found in article 16 of the Law No. 18 of 2003 on advocates but does not govern clearly. Obscurity is found in the word good faith after the interpretation of the sentence of goodwill is limited to the legislation. (2) Law enforcement against the delic action of obstruction of justice conducted by the Advocate in the corruption case in Indonesia, which is first submitted by the police to the party to the advocate who held it and be dealt with in accordance with applicable laws

Keywords: *Decision of the Constitutional Court Number 26 / PUU-XI / 2013, Advocate, and Immunity Rights*

